PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

HERODIMUS MERDIANATA

NIM. B1011221095

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Herodimus Merdianata
NIM	:	B1011221095
Jurusan	:	IESP
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ~~Proposal~~ / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan ~~Proposal~~ / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 13 Mei 2026



(Merdianata)

NIM. B1011221095

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Herodimus Merdianata
NIM	:	B1011221095
Jurusan	:	IESP
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 3 Juni 2026



(Herodimus Merdianata)
NIM. B1011221095

LEMBAR YURIDIS

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Herodimus Merdianata
B1011221095

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 8 April 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si.	27/4-2026	
		NIP 196211201989032003		
2.	Ketua Penguji	Dr. Restiatun, S.E., M.Si.	24/4-2026	
		NIP 197505212002122001		
3.	Anggota Penguji	Supriaman, S.Pd., M.Si.	24/4-2026	
		NIP 199104132023211000		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 13 MAY 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

"Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita."

Kolose 3:17

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik Tugas Akhir dengan judul "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat". Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak sempurna dan tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph. D. selaku Ketua Jurusan Ilmu ekonomi Studi Pembangunan.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan.
4. Ibu Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing utama akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan solusi dalam pengerjaan Tugas Akhir penulis.
5. Ibu Dr. Restiatun, S.E., M.Si. selaku dosen penguji utama penulis pada saat Seminar Proposal dan Tugas Akhir penulis dan sudah memberikan arahan dan saran.
6. Bapak Supriaman, S.Pd., M.Si. selaku dosen penguji kedua penulis pada saat Seminar Proposal dan Tugas Akhir penulis dan sudah memberikan arahan dan saran.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses administrasi Tugas Akhir penulis.
9. Utama dari yang paling utama, penulis mengucap syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, kekuatan, dan penyertaan-Nya yang tidak pernah terputus. Di setiap lelah, ragu, dan doa yang terucap dalam diam, penulis belajar bahwa setiap janji dan pengharapan-Nya selalu hadir indah tepat pada waktu-Nya.
10. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Amos dan Ibu Teripusa, Tugas Akhir ini penulis persembahkan sepenuh hati. Terima kasih atas doa yang tidak pernah berhenti,

pengorbanan yang sering tak terucap, serta kasih yang menjadi sumber kekuatan penulis hingga mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini. Tanpa doa orang tua, penulis tidak akan sampai pada titik ini.

11. Kepada adik terkasih penulis, Viona Caroline, terima kasih telah menjadi pendengar setia, penguat, dan teman berbagi cerita dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
12. Kepada nenek Seranti dan bibi Selumi penulis satu-satunya, terima kasih atas kasih yang tulus dan kehadiran yang senantiasa memberi warna indah sejak penulis kecil hingga dewasa.
13. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang selalu mengiringi langkah penulis.
14. Kepada sahabat kecil penulis yaitu Jansari, terima kasih atas kesetiaan dalam mengingatkan, mendoakan, dan menemani penulis hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
15. Kepada teman ngopi penulis, Onel, Oki, Aldi, Zainul, Iqbal, Nanda, Haikal terima kasih atas kebersamaan, malam-malam panjang, dan tawa di tengah lelah dalam perjuangan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
16. Kepada saudara rohani penulis, @Our_Home13, Septia, Oki, Onel, Risma, Rima, Manda, Tiur, Beka, Wendy, Vera, dan Piki, terima kasih telah menghadirkan kebersamaan, canda, dan penguatan yang menghibur penulis di masa akhir semester.
17. Kepada KK Proskuneo, khususnya Sony Anderson selaku PKK, terima kasih atas perhatian, pendampingan, dan kesediaan menjadi tempat bertanya serta berbagi cerita dalam setiap proses perbaikan. Terima kasih juga kepada seluruh AKK yang telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis.
18. Kepada teman KM8 penulis, Eric, Melania, Selvi, Maya, dan Astrid terima kasih atas bantuan, kebersamaan, dan kesediaan hadir dalam berbagai keadaan, termasuk saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah.
19. Kepada squad cemerlang penulis, Anang, Jason, Mustafa, Haikal, Rico, Netanel, terima kasih telah menghadirkan kebahagiaan melalui canda tawa dan cerita yang saling menguatkan.
20. Kepada seluruh kakak, abang, dan teman-teman KeMah Kristen, terima kasih atas kebersamaan, dukungan rohani, dan doa yang senantiasa menguatkan penulis selama menempuh perkuliahan.
21. Kepada seluruh teman seperjuangan Kelas B dan angkatan 2022, terima kasih atas kesan, pesan, dan motivasi yang menemani perjalanan perkuliahan penulis hingga titik akhir ini.

22. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih atas setiap bantuan, informasi, dan dukungan yang sangat berarti.
23. *Last but not least*, kepada Herodimus Merdianata, penulis Tugas Akhir ini. Terima kasih telah bertahan di tengah kelalaian, kesalahan, tantangan, dan keraguan. Terima kasih karena tidak pernah berhenti mencoba, meskipun keadaan sering kali terasa berat dan seolah memaksa untuk menyerah. Dari perjalanan ini, penulis belajar untuk tetap setia dan berpengharapan, sebab rencana Tuhan selalu lebih besar dari apa yang dapat dipahami. Selamat melangkah ke perjalanan yang lebih panjang. Tetap kuat, tetap percaya, dan tetap semangat Hero.
24. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat menjadi langkah kecil yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi motivasi bagi penulis untuk terus belajar. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Pontianak, 3 Juni 2026

Herodimus Merdianata

B1011221095

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KALIMANTAN BARAT

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of infrastructure development and unemployment rates on income inequality in districts/cities in West Kalimantan Province for the 2018-2024 period. Infrastructure is measured using road length and access to clean drinking water, while income inequality is measured using the Gini Ratio. The study used multiple linear regression with a panel data approach in 14 districts/cities. The results indicate that road length and access to safe drinking water exhibit a positive but statistically insignificant relationship with income inequality, suggesting that increases in infrastructure quantity have not been directly accompanied by improvements in income distribution. In contrast, the open unemployment rate shows a negative relationship with income inequality, reflecting a compression effect, namely a narrowing of income disparities between upper-middle and lower-income groups, particularly during the pandemic period.

Keywords: Income Inequality, Infrastructure, Open Unemployment Rate.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2024. Infrastruktur diukur melalui indikator panjang jalan dan akses air minum layak, sedangkan ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Rasio Gini. Penelitian menggunakan metode regresi linier berganda dengan pendekatan data panel pada 14 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang jalan dan akses air minum layak memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga peningkatan kuantitas infrastruktur belum secara langsung memperbaiki distribusi pendapatan. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang mencerminkan adanya efek kompresi, yaitu penyempitan kesenjangan pendapatan antara kelompok menengah atas dan kelompok bawah terutama selama periode pandemi.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Infrastruktur, Tingkat Pengangguran Terbuka.

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KALIMANTAN BARAT

Oleh: Herodimus Merdianata

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar belakang

Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan adalah ketimpangan pendapatan, yaitu kondisi ketika distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pembangunan infrastruktur dan tingkat pengangguran. Di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, ketimpangan pendapatan masih tergolong sebagai masalah struktural karena adanya perbedaan akses terhadap peluang ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar masyarakat. Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan yang berfluktuasi selama periode 2018-2024. Pada masa pandemi COVID-19, Rasio Gini mengalami penurunan akibat melemahnya pendapatan kelompok menengah atas, namun kembali meningkat pada masa pemulihan ekonomi karena pemulihan pendapatan yang tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur melalui peningkatan panjang jalan dan akses air minum layak dipandang mampu memperluas akses ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat menyebabkan manfaat pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu sehingga berpotensi memperbesar ketimpangan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menjadi faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan karena masyarakat yang menganggur kehilangan sumber pendapatan dan mengalami penurunan kesejahteraan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh panjang jalan, akses air minum layak, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2024 menggunakan pendekatan data panel.

2. Permasalahan

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat meskipun pembangunan infrastruktur terus dilakukan dan kondisi ekonomi mengalami pemulihan pascapandemi. Ketimpangan tersebut diduga dipengaruhi oleh belum meratanya pembangunan infrastruktur, khususnya panjang jalan dan akses air minum layak, serta tingkat pengangguran terbuka yang masih berfluktuasi. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembangunan

infrastruktur dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan juga masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah panjang jalan, akses air minum layak, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2024

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh panjang jalan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat.
2. Menganalisis pengaruh akses air minum layak terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan data panel, yaitu gabungan antara data time series dan cross section. Penelitian dilakukan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2018–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Penanganan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Rasio Gini. Variabel independen terdiri dari panjang jalan, akses air minum layak, dan tingkat pengangguran terbuka. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan data panel melalui pemilihan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap ketimpangan pendapatan.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam analisis data panel adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil regresi, variabel panjang jalan dan akses air minum layak memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur belum secara langsung mampu memperbaiki pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut diduga terjadi karena manfaat pembangunan infrastruktur belum dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat dan wilayah. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini menunjukkan adanya fenomena compression effect, yaitu kondisi ketika peningkatan pengangguran justru diikuti penurunan ketimpangan secara statistik akibat menurunnya pendapatan kelompok menengah atas, terutama pada masa pandemi COVID-19. Namun, kondisi tersebut tidak

menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan akibat kontraksi ekonomi yang memengaruhi kelompok pendapatan lebih tinggi. Secara keseluruhan, variabel panjang jalan, akses air minum layak, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan kondisi pasar tenaga kerja memiliki keterkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS..... iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....iv
ABSTRACT..... vii
ABSTRAK..... vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI.....xi
DAFTAR TABEL..... xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....xv
1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 10
2.1 Tinjauan Teori.....10
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan..... 10
2.1.2 Hipotesis Kuznets 11
2.1.3 Pembangunan Infrastruktur..... 12
2.1.4 Tingkat Pengangguran 13
2.2 Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....14
2.3 Pengaruh Akses Air Minum Layak Terhadap Ketimpangan Pendapatan 14
2.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan 15
2.5 Tinjauan Empiris.....16
2.6 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian.....18
2.6.1 Kerangka Konseptual..... 18
2.6.2 Hipotesis Penelitian..... 18
3. METODE PENELITIAN.....19

3.1 Bentuk, Tempat dan Waktu Penelitian 19
3.2 Jenis dan Sumber Data 19
3.3 Populasi dan Sampel 19
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 19
3.5 Metode dan Alat Analisis 20
3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 20
3.5.2 Model Regresi Linier Berganda 21
3.5.3 Uji Spesifikasi Model 22
3.5.4 Uji Asumsi Klasik 23
3.5.5 Uji Hipotesis 23
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 24
4.1 Hasil Penelitian 24
4.1.1 Uji Spesifikasi Model 24
4.1.2 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 25
4.1.3 Uji Asumsi Klasik 27
4.1.4 Uji Hipotesis 28
4.2 Pembahasan 29
4.2.1 Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Pendapatan 29
4.2.2 Pengaruh Akses Air Minum Layak Terhadap Ketimpangan Pendapatan 31
4.2.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan 32
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 34
5.1 Kesimpulan 34
5.2 Rekomendasi 35
DAFTAR RUJUKAN 36
LAMPIRAN 40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel dan Pengukuran Penelitian 20

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow 24

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman 25

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi *Fixed Effect Model* (FEM) 25

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 27

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 27

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 27

Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (F) 28

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (t) 28

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 29

Tabel 4.10 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Rasio Gini Pada Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Gini Kalimantan Barat Tahun 2018-2024 3

Gambar 1.2 Total Panjang Jalan (Km) Kalimantan Barat Tahun 2018-2024 5

Gambar 1.3 Akses Air Minum Layak (Persen) Kalimantan Barat Tahun 2018-2024 6

Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kalimantan Barat Tahun 2018-2024 7

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data yang diolah.....40

Lampiran 2 Hasil Uji Chow.....44

Lampiran 3 Hasil Uji Hausman.....44

Lampiran 4 Hasil Uji *Fixed Effect Model*.....45

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas.....45

Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....46

Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....46

Lampiran 8 Hasil Uji Simultan (F), Uji Parsial (t), dan Uji Koefisien Determinasi (R2) 46

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KALIMANTAN BARAT

[1]Herodimus Merdianata
Universitas Tanjungpura, Pontianak

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of infrastructure development and unemployment rates on income inequality in districts/cities in West Kalimantan Province for the 2018-2024 period. Infrastructure is measured using road length and access to clean drinking water, while income inequality is measured using the Gini Ratio. The study used multiple linear regression with a panel data approach in 14 districts/cities. The results indicate that road length and access to safe drinking water exhibit a positive but statistically insignificant relationship with income inequality, suggesting that increases in infrastructure quantity have not been directly accompanied by improvements in income distribution. In contrast, the open unemployment rate shows a negative relationship with income inequality, reflecting a compression effect, namely a narrowing of income disparities between upper-middle and lower-income groups, particularly during the pandemic period.

Keywords: Income Inequality, Infrastructure, Open Unemployment Rate.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2024. Infrastruktur diukur melalui indikator panjang jalan dan akses air minum layak, sedangkan ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Rasio Gini. Penelitian menggunakan metode regresi linier berganda dengan pendekatan data panel pada 14 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang jalan dan akses air minum layak memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga peningkatan kuantitas infrastruktur belum secara langsung memperbaiki distribusi pendapatan. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang mencerminkan adanya efek kompresi, yaitu penyempitan kesenjangan pendapatan antara kelompok menengah atas dan kelompok bawah terutama selama periode pandemi.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Infrastruktur, Tingkat Pengangguran Terbuka.

---

herormcher@gmail.com

1. PENDAHULUAN

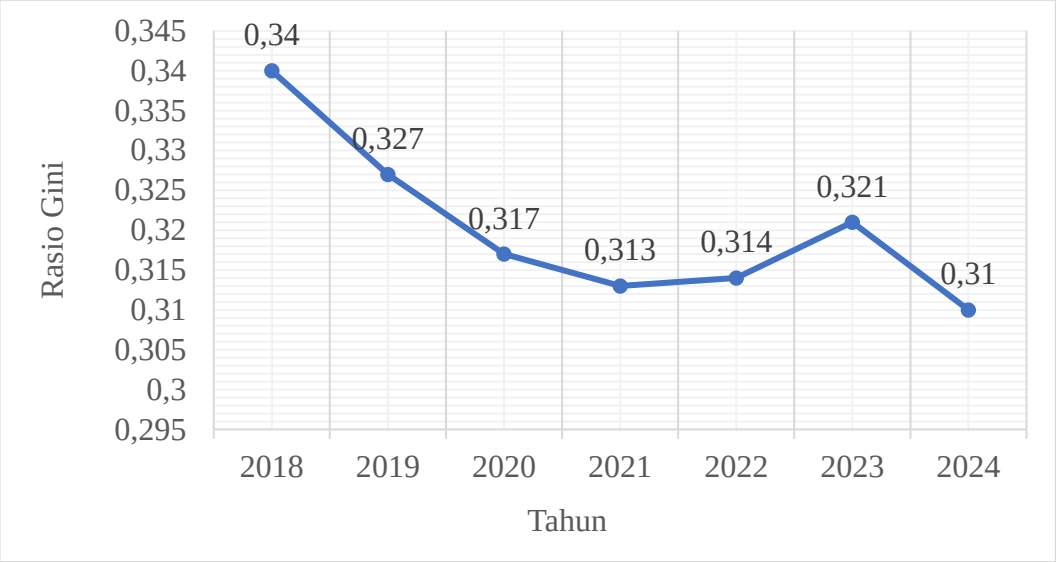
Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan output atau pendapatan per kapita, tetapi juga melibatkan transformasi struktural, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup. Menurut Iqbal *et al*. (2019) pembangunan ekonomi diarahkan pada pengurangan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran, menjadikannya usaha untuk mencapai pemerataan distribusi pendapatan secara sosial. Hulu dan Wahyuni (2021) juga menegaskan bahwa upaya menuju pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus memperhatikan keseimbangan sosial melalui pemerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan pendapatan didefinisikan sebagai kondisi disparitas distribusi pendapatan di antara individu, rumah tangga, atau kelompok dalam suatu masyarakat, yang merupakan tantangan multidimensi di luar sekadar isu ekonomi. Fenomena ini mencerminkan ketidakmerataan hasil pembangunan dan aktivitas ekonomi, di mana sebagian kelompok memperoleh pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya sehingga kesejahteraan tidak dinikmati secara seimbang oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan semakin menonjol sejak era industrialisasi, didorong oleh kemajuan teknologi yang lebih menguntungkan pekerja terampil, perubahan struktur pasar tenaga kerja, serta kebijakan fiskal yang kurang progresif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada dinamika sosial, perubahan struktural, dan kebijakan publik yang memengaruhi distribusi kesempatan dan akses terhadap sumber daya. Ketimpangan pendapatan tidak hanya menciptakan jurang sosial dan ekonomi yang signifikan, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara (Gunawan dan Rahmawati, 2023).

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah struktural meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Menurut Kurniasih (2017) ketimpangan Indonesia disebabkan perbedaan potensi ekonomi, karakteristik demografi, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur ekonomi. Ketidakmerataan tersebut berpengaruh pada perbedaan akses rumah tangga terhadap peluang usaha, lapangan kerja, dan layanan ekonomi, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan antar rumah tangga. Selama beberapa tahun terakhir, Rasio Gini nasional sejalan berada pada kisaran 0,38-0,41, yang menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan rumah tangga masih cukup tinggi dan belum mengalami perbaikan signifikan (BPS, 2024). Ketimpangan pendapatan ini terutama terlihat dari perbedaan penguasaan pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, di mana sebagian besar kelompok rumah tangga berpendapatan rendah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kualitas pendidikan, infrastruktur, serta peluang ekonomi yang memadai. Kondisi ini membuat mobilitas sosial menjadi rendah dan mempersulit rumah tangga miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan. Selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan ketimpangan secara sementara karena banyak pekerja di sektor perkotaan pada umumnya berada pada kelompok pendapatan menengah dan atas yang mengalami penurunan pendapatan. Namun, ketimpangan kembali melebar pada masa pemulihan ekonomi ketika kelompok

berpendapatan tinggi pulih lebih cepat dibandingkan kelompok bawah. Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia bersifat struktural dan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi (Sani *et al.* (2022).

Fenomena ketimpangan pendapatan juga terlihat jelas di Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, distribusi pendapatan antar rumah tangga di provinsi ini masih belum merata. Ketimpangan pendapatan menjadi isu krusial karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga, membatasi mobilitas sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kerentanan kelompok berpendapatan rendah. Sebagian rumah tangga masih menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, layanan dasar, dan fasilitas publik, sehingga kemampuan mereka dalam meningkatkan pendapatan relatif lebih rendah dibandingkan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, memahami dinamika ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat menjadi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat 2025

Gambar 1.1 Rasio Gini Kalimantan Barat Tahun 2018-2024

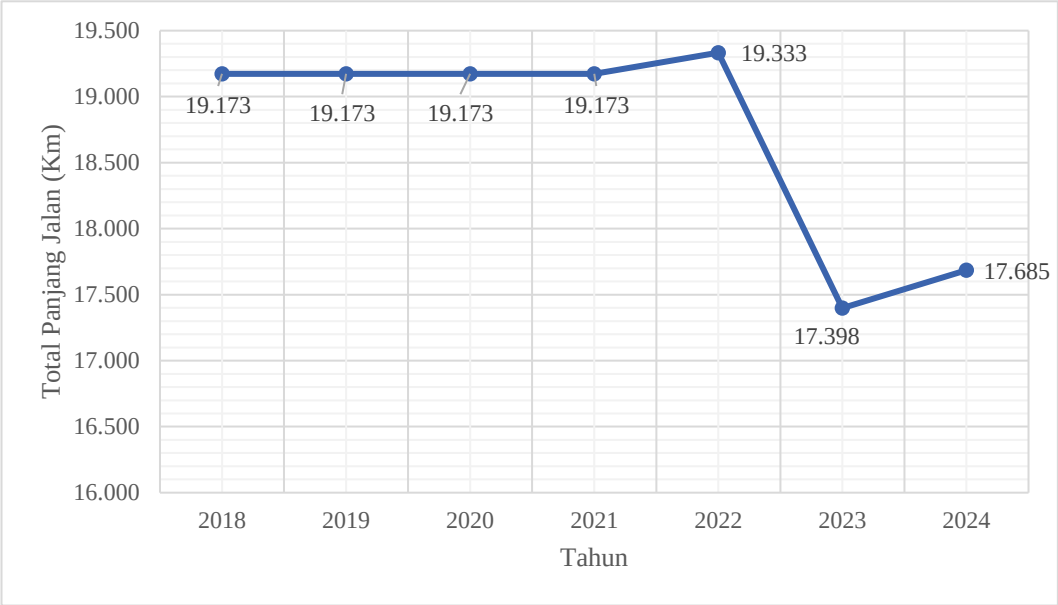
Berdasarkan data BPS (2025) Rasio Gini Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2018-2024 menunjukkan dinamika yang menarik untuk ditelaah. Pada 2018, tingkat ketimpangan tercatat sebesar 0,340 dan terus menurun hingga 2021, mencapai 0,313. Penurunan ini mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan, yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, berbagai bantuan sosial pemerintah serta perlambatan aktivitas ekonomi menyebabkan perbedaan pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah menjadi lebih sempit (Coibion *et al.* 2020). Memasuki periode pemulihan 2022-2023, Rasio Gini kembali meningkat menjadi 0,321 yang menunjukkan pemulihan ekonomi yang tidak merata. Pada 2024, ketimpangan kembali menurun ke 0,310 seiring membaiknya akses ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, ketimpangan di Kalimantan Barat tergolong relatif

rendah, namun fluktuasi pascapandemi menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif agar ketimpangan tidak kembali melebar.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah distribusi infrastruktur yang belum merata. Ketika infrastruktur tidak tersedia secara setara, rumah tangga menghadapi tingkat akses ekonomi yang berbeda sehingga peluang peningkatan pendapatan tidak dapat dinikmati secara merata. Infrastruktur yang memadai pada dasarnya berfungsi memperlancar distribusi barang dan jasa, memudahkan mobilitas tenaga kerja, serta memperluas akses individu maupun rumah tangga terhadap berbagai sumber pendapatan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar rumah tangga (Noviana, 2020). Ketika akses terhadap transportasi, fasilitas dasar, dan teknologi berjalan dengan baik, biaya logistik dapat ditekan, produktivitas meningkat, dan peluang memperoleh pendapatan menjadi lebih luas bagi kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, ketidakmerataan infrastruktur membatasi akses sebagian rumah tangga terhadap pekerjaan, pasar, dan layanan produktif lainnya sehingga pendapatan mereka tertinggal dibanding kelompok yang memiliki akses lebih baik. Berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemeliharaan, serta pengaruh perubahan iklim yang merusak fasilitas dasar turut memperburuk kondisi tersebut dan membuat manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu (Pandey *et al*. 2022). Namun demikian, pembangunan infrastruktur juga berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan apabila akses dan pemanfaatannya lebih cepat dinikmati oleh kelompok rumah tangga tertentu. Pada tahap awal pembangunan, infrastruktur cenderung lebih cepat dimanfaatkan oleh wilayah atau kelompok masyarakat yang memiliki modal dan konektivitas ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, manfaat ekonomi seperti peningkatan produktivitas, kemudahan akses pasar, dan peluang usaha lebih besar dinikmati oleh kelompok tersebut, sementara rumah tangga di daerah tertinggal belum memperoleh manfaat yang sama. Kondisi ini dapat menyebabkan pendapatan kelompok yang terhubung dengan infrastruktur meningkat lebih cepat dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Makmuri (2017) bahwa pembangunan infrastruktur fisik justru dapat memperlebar ketimpangan pendapatan apabila tidak diiringi pemerataan akses dan pemanfaatannya.

Di Kalimantan Barat, tantangan berupa keterbatasan akses transportasi menyebabkan sebagian rumah tangga sulit memanfaatkan peluang ekonomi secara setara. Ketidakcukupan konektivitas transportasi, misalnya, meningkatkan biaya distribusi barang sehingga pelaku ekonomi berskala kecil, termasuk petani dan usaha rumah tangga yang menanggung biaya produksi lebih tinggi dan memiliki daya saing yang lebih rendah dibanding kelompok yang menikmati akses infrastruktur lebih baik. Kondisi ini menahan pertumbuhan pendapatan sebagian masyarakat dan mengurangi kemampuan mereka untuk keluar dari jerat ketimpangan. Dilihat dari keterbatasan fasilitas dasar seperti air bersih, energi, dan pelayanan produktif lainnya membuat sebagian rumah tangga harus mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya untuk kebutuhan harian, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan potensi pendapatan mereka. Pengaruh lingkungan seperti banjir atau kekeringan turut memperburuk kondisi infrastruktur yang sudah lemah,

sehingga rumah tangga berpendapatan rendah menjadi semakin rentan. Oleh karena itu, pembangunan di Kalimantan Barat perlu diarahkan secara inklusif melalui perluasan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar agar seluruh kelompok masyarakat memiliki peluang pendapatan yang lebih adil. Selain itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang justru dapat memperdalam ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Untuk menggambarkan sejauh mana upaya pembangunan infrastruktur telah berlangsung di Kalimantan Barat dan bagaimana perannya dalam mendukung akses ekonomi rumah tangga, bagian berikut menyajikan data empiris mengenai perkembangan panjang jalan selama periode 2018-2024.



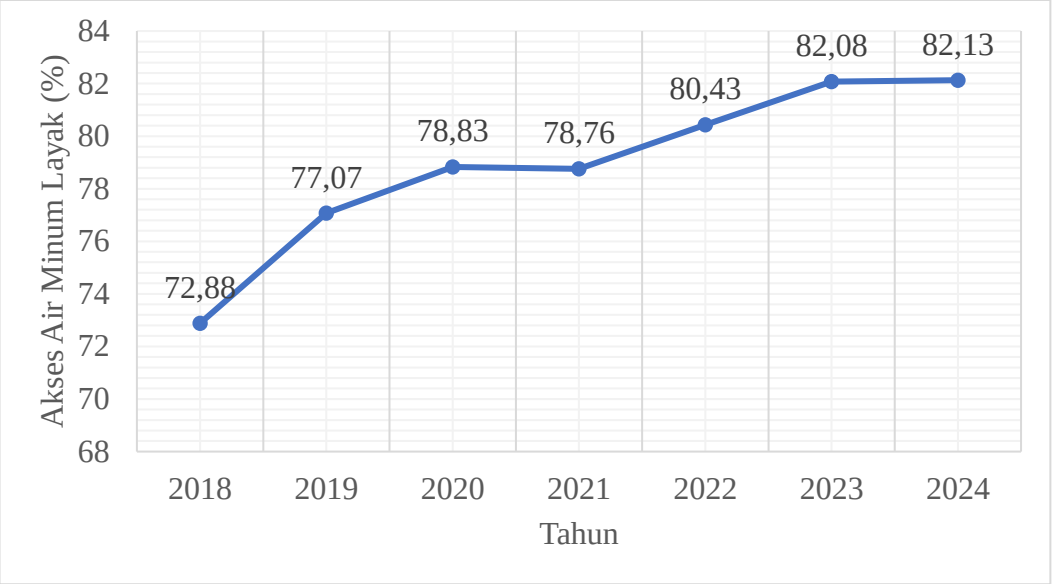
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanganan Jalan Nasional Kalimantan Barat 2025

Gambar 1.2 Total Panjang Jalan (Km) Kalimantan Barat Tahun 2018-2024

Berdasarkan data Dinas PUPR dan BPJN (2025) Kalimantan Barat selama periode 2018-2024 menunjukkan pola yang cenderung stagnan pada awal periode, yaitu dari tahun 2018 hingga 2021 yang tidak mengalami perubahan. Peningkatan baru terjadi pada tahun 2022, meskipun dalam skala yang relatif terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi penurunan panjang jalan, yang mengindikasikan adanya kendala dalam pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur dan juga perubahan fungsi dan status jalan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengembangan infrastruktur jalan belum berlangsung secara tidak sama dari tahun ke tahun. Keterbatasan ini berpotensi menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi, sehingga distribusi manfaat pembangunan menjadi kurang merata.

Berbeda dengan infrastruktur jalan, akses air minum layak merupakan bagian dari infrastruktur sosial dasar yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Peningkatan akses air minum layak berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, serta peningkatan produktivitas

tenaga kerja, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, perluasan akses air minum layak berpotensi mempersempit kesenjangan kesejahteraan antar rumah tangga dan berperan sebagai faktor pemerata distribusi pendapatan (Taryn L. *et al.* 2024).



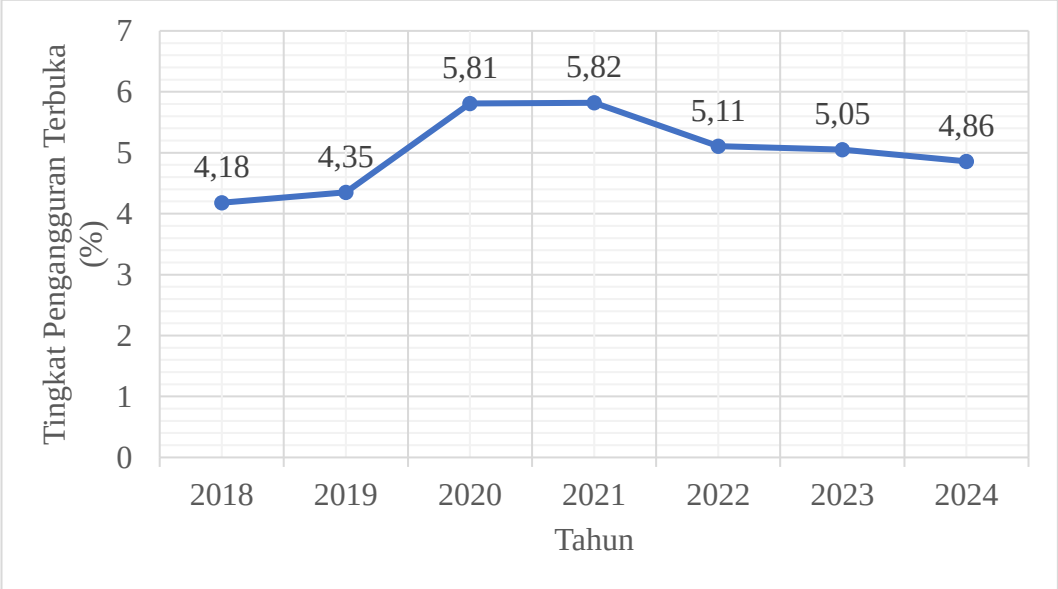
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat 2025

Gambar 1.3 Akses Air Minum Layak (Persen) Kalimantan Barat Tahun 2018-2024

Berdasarkan data BPS (2025), akses air minum layak di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan yang sejalan sepanjang periode 2018-2024. Pada tahun 2018, persentase akses baru mencapai 72,88 persen dan meningkat cukup signifikan menjadi 77,07 persen pada 2019. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 78,76 persen dari 78,83 persen pada 2020, pola umum tetap menunjukkan arah pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2024, akses air minum layak mencapai 82,13 persen, yang menunjukkan bahwa lebih dari delapan puluh persen penduduk Kalimantan Barat telah memperoleh layanan air minum layak. Meskipun tren meningkat, pengaruhnya terhadap ketimpangan perlu diuji karena peningkatan akses belum tentu merata pada setiap rumah tangga.

Selain infrastruktur, faktor yang diyakini memiliki peranan penting dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dan memiliki keinginan untuk bekerja, namun belum memperoleh pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan individu tidak memiliki sumber pendapatan tetap, sehingga memperbesar risiko rendahnya kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula jumlah penduduk yang tidak memperoleh pendapatan, yang pada akhirnya berpotensi memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan dalam perekonomian (Hindun *et al.* 2019). Secara umum hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan umumnya dipandang bersifat positif, di mana peningkatan tingkat pengangguran cenderung memperlebar ketimpangan pendapatan. Kondisi ini terjadi karena pengangguran secara langsung menekan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, sementara

kelompok yang memiliki pekerjaan tetap memperoleh pendapatan, sehingga jarak pendapatan antarindividu semakin melebar. Pada pengangguran terbuka, individu yang tidak bekerja tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah menjadi semakin jelas (Nadya dan Syafri, 2019). Pola ini umumnya berlaku dalam kondisi perekonomian yang relatif stabil, ketika pengaruh pengangguran lebih banyak dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah. Pada skala pembangunan ekonomi daerah, tingginya tingkat pengangguran mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja produktif dan belum meratanya distribusi manfaat pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk belum memperoleh akses yang memadai terhadap kesempatan kerja yang layak, sehingga berpotensi memperbesar ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, tingkat pengangguran dipandang sebagai salah satu faktor struktural yang relevan dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pengaruhnya penting untuk diuji secara empiris pada daerah penelitian.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat 2025

Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kalimantan Barat Tahun 2018-2024

Berdasarkan data BPS (2025) tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2018-2024 menunjukkan pola fluktuatif yakni dipengaruhi oleh kondisi ekonomi melalui perubahan output dan permintaan agregat yang memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Ketika terjadi kontraksi ekonomi, permintaan tenaga kerja menurun sehingga pengangguran meningkat, sedangkan pada saat pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas produksi mendorong penyerapan tenaga kerja dan menurunkan pengangguran. Pada tahun 2018-2019, tingkat pengangguran relatif rendah dan stabil, namun meningkat tajam pada tahun 2020 dan 2021 akibat pengaruh pandemi COVID-19, dengan persentase tertinggi sebesar 5,82 persen. Seiring pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran mulai menurun pada periode 2022-2024 hingga mencapai 4,86 persen pada tahun 2024. Meskipun

demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Perubahan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kalimantan Barat cukup sensitif terhadap guncangan dan pemulihan ekonomi, serta berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan rumah tangga.

Dari data yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur dan pengangguran memegang peran penting dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan sehingga perlu adanya kajian yang mendalam. Namun arah dan besarnya pengaruh tersebut masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berbagai studi menemukan bahwa pembangunan infrastruktur mampu menurunkan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan akses ekonomi masyarakat. Penelitian Riani dan Suseno (2025) menemukan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan dan air berpengaruh signifikan dalam menekan ketimpangan di Pulau Jawa, meskipun faktor lain seperti teknologi informasi dan produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh berarti. Temuan ini menegaskan bahwa akses terhadap infrastruktur dasar masih menjadi faktor kunci, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Sejalan dengan itu, Carla *et al.* (2024) menekankan bahwa kualitas layanan publik dan akses sanitasi memiliki kontribusi yang lebih besar dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dibandingkan sekadar penambahan panjang jalan. Namun demikian, temuan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian lain. Makmuri (2017) justru menemukan bahwa pembangunan infrastruktur fisik berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan karena manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak disertai pemerataan akses dapat memperbesar disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh karakteristik wilayah, kualitas layanan, serta kemampuan infrastruktur tersebut dalam menunjang aktivitas ekonomi.

Ketidaksamaan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel tingkat pengangguran. Nadya dan Syafri (2019) menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh tersebut sering diartikan sebagai kondisi di mana tingginya pengangguran mendorong masyarakat masuk ke sektor informal berupah rendah, yang secara statistik dapat menyebabkan pemerataan pendapatan di kelompok berpendapatan rendah. Temuan ini diperkuat oleh Ersad *et al.* (2022) yang juga menyimpulkan adanya pengaruh signifikan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Akan tetapi, hasil berbeda ditunjukkan oleh Hindun *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan. Kondisi ini disinyalir terjadi karena pengaruh ekonomi pengangguran dapat diredam oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah melalui program bantuan sosial, serta dukungan ekonomi dari anggota keluarga yang bekerja.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut terkait pengaruh pembangunan infrastruktur dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum sejalan, di mana sejumlah studi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berperan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan melalui

peningkatan akses ekonomi masyarakat. Namun, penelitian lainnya justru menemukan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dapat memperlebar ketimpangan karena manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi atau karena pembangunan hanya menekankan aspek kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dan pemerataan akses. Selanjutnya temuan mengenai pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan juga masih beragam, di mana sebagian penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara penelitian lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan akibat adanya faktor pendukung seperti bantuan sosial pemerintah dan dukungan ekonomi keluarga. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pembangunan infrastruktur, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah serta kebijakan yang berlaku. Di sisi lain, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada skala nasional, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat masih jarang dikaji, padahal wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang berbeda, seperti wilayah yang luas, kepadatan penduduk yang rendah, dan keterbatasan konektivitas antarwilayah. Selain itu, kajian infrastruktur umumnya masih terbatas pada indikator tertentu seperti panjang atau kondisi jalan, sementara aspek lain seperti ketersediaan infrastruktur belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji secara simultan pengaruh pembangunan infrastruktur dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan, terutama pada periode 2018-2024 yang mencakup masa pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, agar diperoleh gambaran empiris yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian empiris yang menggabungkan variabel pengaruh pembangunan infrastruktur dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan dalam satu model analisis, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji variabel-variabel tersebut secara parsial atau terpisah. Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan secara kontekstual dengan mengkaji hubungan tersebut pada wilayah dan periode penelitian yang berbeda, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki karakteristik pembangunan, struktur ekonomi, dan peran kebijakan pemerintah. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan apakah pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan rumah tangga atau justru berpotensi memperlebar ketimpangan, serta bagaimana peran tingkat pengangguran dalam memengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga di tengah keberadaan program bantuan sosial pemerintah. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur dalam penelitian ini diukur melalui indikator panjang jalan dan akses air minum layak, serta tingkat pengangguran yang diukur melalui tingkat pengangguran terbuka, dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan pada periode 2018-2024 yang mencakup masa pandemi COVID-19 dan periode pemulihan ekonomi. Dengan menggunakan periode penelitian terkini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terbaru mengenai mekanisme pengaruh pembangunan infrastruktur dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan rumah tangga, sehingga dapat memperkaya literatur sekaligus menjadi bahan rujukan bagi

perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan keadilan sosial.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan apakah panjang jalan dan akses air minum layak sebagai indikator pembangunan infrastruktur, serta tingkat pengangguran terbuka sebagai indikator dari tingkat pengangguran, berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian pembangunan ekonomi daerah, khususnya terkait ketimpangan pendapatan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan kondisi pasar tenaga kerja dalam satu model analisis data panel pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2024. Penggunaan indikator panjang jalan dan akses air minum layak sebagai representasi infrastruktur fisik dan sosial memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme bagaimana infrastruktur memengaruhi distribusi pendapatan, tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, khususnya dalam pemerataan penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan efektivitas alokasi belanja modal, serta pengendalian tingkat pengangguran sebagai upaya menekan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris yang dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pengurangan ketimpangan dan perluasan akses layanan dasar di Provinsi Kalimantan Barat.